

7._FASE_IKATAN_PATRONASE_D ARI_ERA_FEODALIS_DAN_MODE RNISASI.pdf

by

Submission date: 27-Apr-2023 03:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2077017259

File name: 7._FASE_IKATAN_PATRONASE_DARI_ERA_FEODALIS_DAN_MODERNISASI.pdf (286.42K)

Word count: 7009

Character count: 47028

FASE IKATAN PATRONASE DARI ERA FEODALIS DAN MODERNISASI PADA KOMUNITAS PETANI DI SULAWESI SELATAN

Iskandar

Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar

Tahun 2019

Abstrak

Keberhasilan Sulawesi Selatan menjadi lumbung pangan Nasional tidak terlepas dari peran ikatan Patronase dari era feodalis hingga era modernisasi pertanian hingga kini. Penelitian ini ingin mengetahui secara mendalam pola ikatan patronase yang mewarnai sejarah panjang pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi dijelaskan bahwa telah terjadi pergeseran arah bentuk patronase setelah kepentingan sosial ekonomi petani terserap modernisasi. Pergeseran dengan cara memperlihatkan bahwa melemahnya ikatan patronase antar patron dan klien di Sidrap dan Jeneponto, karena arah hirarki vertikal yang mengikat patron dan klien di kegiatan usaha tani masih berpola konvensional (umumnya penguasaan sarana ekonomi masih dipegang kerabat patron dan masih eksisnya pola feodalis), kondisi ini hanya mengarahkan hirarki lebih berorientasi ke tindakan eksploitasi (timpangnya pembagian hasil kerja dan klien hanya dijadikan alat kekuasaannya) ketimbang intens dalam memberi perlindungan.

Kata kunci: patronase; feodalis; modernisasi; petani; Sulawesi Selatan.

Pendahuluan

Kajian tentang ikatan patronase pada komunitas petani di pedesaan Sulawesi Selatan diawali oleh kajian Kooreman pada tahun 1883. Dalam kajiannya, Kooreman menemukan pola kepengikutan (*Volgelingzijn*) yang harmoni antar para tuan tanah dengan para petani miskin dalam tatanan "*Minawang*". Konsep tentang "*Minawang*" sebagaimana gambaran Kooreman juga dikembangkan oleh Matthes (1885;2015); Chabot (1950); Friedericy (1963); Pelras (1981;2000); dan Ahimsyah Putra (1988), dimana senada menyebutkan bahwa pola hubungan patron-klien dalam tatanan "*Minawang*" tidak hanya mampu menolong petani miskin di pedesaan, namun juga mampu berfungsi sebagai penghambat melebarnya jarak sosial akibat ketimpangan kekuasaan ketika itu. Dengan demikian, ikatan patronase menjadi alat solidaritas sosial dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat desa di Sulawesi Selatan, dimana alat ini berfungsi sebagai penghambat terciptanya polarisasi sosial yang tajam antara petani kaya dan petani miskin. Ketika penerapan pertanian moderen, kajian ikatan patron-klien versi baru pun muncul. Versi ini mengaitkan antara eksistensi ikatan patronase dengan meluasnya modernisasi pertanian, sebagai pemicu pergeseran sosial di pedesaan Sulawesi Selatan. Kajian-kajian itu oleh: Effendi (1981) tentang punggawa dan pajjama di Jeneponto; Buntoro (1984) tentang ikatan karaenguranna dan peran elit tradisional di Jeneponto; Asraf (1989) tentang masa depan ikatan patron-klien di era pertanian komersial di Sidrap; Syamsuddin (1990) tentang eksistensi ikatan patron-klien di tengah meluasnya pertanian komersial di Maros; Parakkasi (1992) tentang eksisnya ikatan patron-klien di tengah kemajuan agrobisnis di Wonomulyo; dan oleh Haerani (1996) tentang eksistensi pola ikatan patronase, kemiskinan, spesialisasi usaha dan arah pengwilayahan komoditas unggulan di Jeneponto. Berbagai kajian ini menandakan pola ikatan patronase tetap eksis hingga memasuki era reformasi sekarang ini. Eksistensi ikatan patron-klien dalam proses modernisasi pertanian sebenarnya telah nampak sejak awal digerakkannya program revolusi hijau di tahun 1970. Menurut Sallatang (1997:24-31) bahwa ketika itu petani di sentra-sentra produksi padi di Sulawesi Selatan menjadi klien dari para *stakeholder* (pejabat, aparat, akademisi, tokoh masyarakat, dan pengusaha) dalam program bapak angkat. Program ini menjadi bagian dari program "*Lappo Ase*" yang menghimpun ide petani dalam mensukseskan swasembada beras di tingkat regional dan tingkat nasional. Ketika pemerintah meraih swasembada Nasional di

1984, program bapak angkat turut andil terhadap peraihannya, sebabikatan perlindungannya dianggap mampu memicu semangat petani untuk meningkatkan produktifitas usaha tani. Di sisi lain program ini berkorelasi dengan peningkatan taraf hidup petani. Namun eksistensinya kelihatan renggang setelah Pemda mencanangkan revolusi hijau tahap lanjut dengan tema pengwilayahan komoditas unggulan di seluruh perdesaan Sulawesi Selatan yang dimulai di tahun 1986 hingga dewasa ini. Pasang surutnya hirarki ikatan patron-klien bagi komunitas petani di pedesaan menurut Scott (1972:101; 2009) terkondisikan oleh tiga faktor, yakni (1) ketimpangan sumber daya, seperti: kekayaan, status, dan kekuasaan; (2) tidak adanya pranata yang menjamin keamanan individu secara fisik dan sosial; (3) ketidakmampuan unit kerabat menjadi sarana perlindungan keamanan dan sarana memajukan diri. Ketiga faktor ini mengalami pergeseran menurut Scott (1972b:41) apabila terjadi: (1) diferensiasi sosial; (2) pertumbuhan negara kolonial; dan (3) komersialisasi pertanian. Ketiga struktur dasar ikatan patronase ini menurut Scott (1972:76) bahwa, berpotensi untuk mempercepat maupun menghambat tujuan dan proses modernisasi di pedesaan. Sehingga menurut Scott (1972; 2009) definisi ikatan patron-klien merupakan kasus khusus ikatan diadik (dua orang) melibatkan persahabatan yang sebagian besar bersifat instrumental, di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan kelebihan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat ke yang lebih rendah, atau keduanya, bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (klien) yang pada gilirannya, membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi, kepada pelindung (patron).

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi etnografi dalam pengungkapan sejarah perkembangan ikatan Patronase. dengan digunakannya pendekatan ini adalah peneliti ingin menggambarkan lebih mendalam dan kongkrit tentang perjalanan sejarah perkembangan ikatan patronase di pedesaan Sulawesi Selatan. Jenis penelitian etnografi biasanya digunakan untuk mengungkapkan makna sosio-kultural dengan cara mempelajari pola hidup serta interaksi antar kelompok sosio kultural (*culture sharing group*) tertentu di dalam sebuah ruang ataupun konteks yang spesifik (Spradley 1980; Sugiyono 2010). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berbentuk wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya kegiatan analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode kategorisasi data dan interpretasi data. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan (dari Januari hingga Juli 2016) dan sampel penelitian yang digunakan adalah model purposive sampling dengan obyek penelitian berada di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto yang mewakili suku Bugis dan suku Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kerangka Konseptual

Terkaitnya seseorang dalam jaringan ikatan patronase di pedesaan, ini telah disinggung jauh sebelumnya oleh Linton (1945) dan Redfield (1959). Menurut Linton (1945:201-222) bahwa pada setiap proses mutasi (berlangsung tiga mutasi perkembangan), seseorang akan terhirarki dalam ikatan tradisional (ikatan patronase) karena adanya perbedaan kemampuan dan sumber daya. Sedangkan menurut Redfield (1959) bahwa terhirarkinya seseorang dalam jaringan ikatan patron-klien di pedesaan, ini berdasarkan latar belakang posisinya dalam *little tradition* (miskin, kelas rendahan, dan tidak memiliki kekuasaan) dan *great tradition* (kaya, bangsawan, dan pemimpin dalam masyarakat). Baik Linton maupun Redfield sependapat bahwa garis hirarki patronase tidak bersifat dikotomi, melainkan proses penyatuan. Dengan mengacu pada pandangan ini, Soemardjan (1981) berkesimpulan bahwa hubungan patron-klien bertahan di pedesaan karena ikatan ini menjadi pilihan sadar dari pihak-pihak yang terlibat demi terpeliharanya harmoni, dan di sisi lain ikatan ini berfungsi untuk menghambat melebarnya jarak sosial sebagai akibat melebarnya jarak ekonomi antar petani kaya dan petani miskin di pedesaan. Dalam teori ikatan patron-klien, terhirarkinya seseorang dalam jaringan ikatan patron-klien menurut Scott (1972:101) dapat di amati oleh tiga proses sosial, yakni: (1) ketimpangan yang mencolok dalam kepemilikan

sumber daya, seperti: kekayaan, status sosial dan kekuasaan; (2) tidak adanya pranata yang menjamin keamanan individu secara fisik dan sosial; (3) ketidakmampuan ikatan kekerabatan berfungsi sebagai sarana perlindungan keamanan dan sarana memajukan diri. Menurut Scott bahwa, ke-tiga syarat jaringan ini sifatnya saling terkait satu sama lain dan bergantung pada pasang surutnya kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Oleh karenanya ketiga syarat ini telah hadir di perdesaan sejak jaman feodalis (era sistem Kerajaan di berbagai benua) dan utamanya ketika modernisasi berlangsung di pedesaan. Syarat pertama dikemukakan Scott (1972) yakni, ketimpangan sumber daya (kekayaan, status, dan kekuasaan) sesuai temuan Cohen (1966); Wertheim (1964); dan Wolf (1966). Temuan Cohen (1966) pada suku Bornu di Afrika menyebutkan bahwa unsur-unsur ketimpangan sumber daya tersebut (kekayaan, status, dan kekuasaan), mengaktual oleh adanya perbedaan sosial antar kaum bangsawan dan kaum budak. Ikatan patron-klien pada suku ini mengaktual menurut Cohen (1966:90-95) yakni setelah ketiga unsur sumber daya tersebut menjadi rebutan atau menjadi pemecah konflik (peperangan) antar sesama kaum bangsawan. Dimana konflik ini berefek pada meluasnya kekacauan, kemelaratan, dan penindasan, terhadap kaum hamba. Dan untuk terhindar dari efek konflik tersebut maka tidak ada pilihan lain bagi kaum budak untuk mencari perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya kepada kaum bangsawan. Mengaktualnya ikatan patron-klien di balik konflik kepentingan antara sesama kaum bangsawan, juga sesuai temuan Wertheim (1964) pada masyarakat petani di Indonesia dan Wolf (1966) pada masyarakat tani di Meksiko. Tiga temuan mengenai eksistensi ketimpangan sumber daya sebagai pemicu mengaktualnya ikatan patron-klien di era feodalis, ini sejalan dengan temuan Kooreman (1883); Friedericy (1933); dan Chabot (1950), ketika wilayah perdesaan Sulawesi Selatan menjadi bagian dari kekuasaan tiga Kerajaan besar (Bone, Gowa, dan Mandar). Mereka senada menyebutkan bahwa mengaktualnya ketiga unsur ketimpangan sumber daya ditandai oleh hadirnya ornamen yang disebut *Gaukang*. Ornamen ini memisahkan secara tegas kepemilikan ketiga unsur sumber daya ini antara kaum bangsawan dan kaum hamba, dimana kepemilikannya hanya diperuntukkan oleh kaum bangsawan, sedangkan bagi kaum hamba diwajibkan menjaga dan berlandung dalam lembaga Minawang pada kaum bangsawan. Mengaktualnya ikatan patron-klien di balik ornamen tersebut yakni oleh peralihan status bangsawan ke Ajoareng (patron) dan status hamba menjadi Joa (klien). Ajoareng sebagai pewaris *Gaukang*, adalah pihak yang bergelimang harta kekayaan, status sosial yang tinggi, dan kekuasaan yang tak terbatas. Sedangkan posisi para Joa adalah buruh tani yang hidupnya miskin, tidak berstatus, dan tidak memiliki peluang kekuasaan.

Hasil Penelitian

Perkembangan ikatan patronase dijelaskan dua fase kehidupan petani, yaitu fase feodalis dan fase modernisasi pertanian. Penjelasan kedua era ini tidak hanya menjadi wadah yang makin mengekskiskan keterkaitan antar hirarki patronase dan modernisasi namun juga menjadi mata rantai terhadap munculnya berbagai pergeseran pola hubungan atau munculnya peran-peran baru dalam ikatan patronase di era kini. Untuk itu, seluruh uraian tentang kehadirannya berkontribusi terhadap berbagai aspek pada temuan.

Di Era Feodalis (Akhir 1800-1969)

Pada era feodalis wujud hirarki ikatan patron-klien berada pada posisi berdampingan dengan hubungan bangsawan-budak, yakni ketika dua wilayah penelitian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisonal di Sulawesi Selatan (seperti: kerajaan *Bugis* di Amparita dan kerajaan *Gowa* di Bontorannu). Untuk mengungkap wujud ikatan patron-klien di fase feodalis ini, uraian akan tersusun menurut rumusan Scott tentang tiga wujud ikatan patron-klien. Realitas dari ke-tiga wujud tersebut ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya, yakni seperti oleh: Kooreman (1883); Matthes (1865); Nijpels (1902); Friedericy (1933); Chabot (1950); Mattulada (1995); dan informan, hal itu baik tentang asal mula terwujudnya hirarki ikatan patron-klien di perdesaan Sulawesi Selatan, maupun berbagai fenomena sosial masyarakatnya yang menyertai perkembangan ikatan patronase

di era feodalisme. Untuk itu penjelasannya seperti berikut ini: a) Ketimpangan Kepemilikan Sumber Daya (Kekayaan, Status, dan Kekuasaan) Menurut Scott (1972) terwujudnya hirarki ikatan patron-klien oleh faktor ketimpangan penguasaan atas kekayaan, status sosial, dan kekuasaan, di era feodalisme, yakni ketika meluasnya kriteria askripsi dalam struktur sosial masyarakat perdesaan, dimana bentuk pertukaran sosial di dalamnya bersifat vertikal yang asimetris (Scott mencontohkan masyarakat Eropa di Abad pertengahan). Hal ini menurut Matthes (1865) bahwa, ketika itu ketimpangan kepemilikan sumber daya (kekayaan, status, dan kekuasaan) sangat kontras dalam memisahkan antar kaum bangsawan dan kaum budak, demikian halnya antar Ajoareng dan Joanya. Hal senada dari Kooreman (1883), menurutnya bahwa di sepanjang abad ke-IX hanya kaum bangsawan yang menjadi patron, karena menguasai seluruh akses sumber daya, sebaliknya bagi kaum budak yang menjadi klien karena jauh dari akses sumber daya tersebut, sehingga bentuk ikatan patron-klien menjadi sangat asimetris bentuknya. Adapun pihak yang terhindar dari polarisasi ini adalah kalangan "*Todeceng*" atau kalangan masyarakat biasa yang bekerja di pemerintahan dan kaum pedagang. Namun menurut Kooreman (1883) bahwa jumlah kaum "*Todeceng*" ini sangat sedikit ketika meluas ikatan patron-klien di era feodalisme, karena profesi birokrat dan pedagang cenderung dikuasai oleh orang-orang Belanda dan orang Cina. Faktor ketimpangan kekayaan antar ke-dua kelompok ini di latar belakang oleh timpangnya penguasaan atas: tanah (persawahan, kebun, dan lahan tempat tinggal), harta benda (emas, uang, dan ternak), dan rumah (jenis bangunan dan jumlahnya). Namun yang paling menonjol dari ketimpangan kekayaan tersebut adalah kepemilikan tanah, utamanya lahan persawahan (Matthes, 1865 dan Kooreman, 1883). Ketimpangan ini menyebabkan persawahan menjadi barang langka di perdesaan. Kelangkaan terhadap persawahan nampaknya mempengaruhi kelangkaan di ke-dua aspek tersebut, sehingga persawahan menjadi simbol status sosial dan simbol kekuasaan ketika itu. Wujud kelangkaan lahan nampak ketika kalangan bangsawan (patron) menguasai hampir seluruh tanah di perdesaan, sedangkan kalangan non-bangsawan (klien) nyaris tidak memiliki atau hanya sebagai pekerja saja. Temuan Kooreman (1883); Matthes (1865); dan Chabot (1950), menyebutkan bahwa kelangkaan lahan ini bersumber dari pemahaman konsep "*To-Manurung*". Pemahaman ini menempatkan kaum bangsawan sebagai strata atas yang di takdirkan berhak menguasai seluruh sumber kehidupan di bumi Sulawesi Selatan, sebaliknya bagi kaum budak yang berada pada strata bawah hanya berhak sebagai penjaga dan berkewajiban merawat sumber kehidupan tersebut. Pembuktian perbedaan hak penguasaan terhadap sumber kehidupan (utamanya tanah) ini ditandai oleh kehadiran benda ornamen yang disebut *Gaukang*. Ornamen ini berupa benda yang disimpan di sekitar tanah persawahan ataupun rumah seorang bangsawan, dimana ornamen ini dimitoskan memiliki kekuatan magic bagi orang yang memilikinya, sehingga benda tersebut dikeramatkan dan disucikan oleh seluruh masyarakat, berikut mengagungkan pemiliknya. Mitos *Gaukang* ini menurut Kooreman (1883:86-91), adalah merupakan simbol perbedaan hak dan kelangkaan sumber daya yang menyatu ke dalam nilai-nilai magic masyarakatnya. Sebab di balik benda tersebut menurut Chabot (1950), terdapat sekelompok orang (kaum bangsawan) yang secara askriptif terlegitimasi untuk menguasai sumber daya yang menempel pada ornamen itu, dan sekelompok lainnya (kaum hamba) secara askriptif terlegitimasi sebagai pihak yang tidak berhak menguasai sumber daya tersebut. Walaupun demikian, menurut Kooreman (1883) dan Chabot (1950) bahwa, di balik legitimasi kelas kaya miskin tersebut, ornamen *Gaukang* adalah simbol kebersamaan warganya dalam upaya penciptaan rasa aman, baik aman terhadap pemenuhan kebutuhan akan makan maupun aman dikala menghadapi musibah dan ancaman keamanan fisik. Sebagai sistem sikuritas sosial, menurut Kooreman dan Chabot, bahwa sistem ini terdiri dari dua unsur penting yakni "*Situlung-tulung*" dan "*Minawang*", kedua unsur ini menjadi alat perekat yang mendekatkan jarak antar golongan mampu dan golongan tak mampu. Dan hal yang penting dari nilai kohesif itu adalah, kedua unsur ini yang menjadi pilar utama berdirinya bangunan ikatan

patron-klien di era feodalis. Sebagai pilar utama dalam ikatan patron-klien, nilai "*Situlung-tulung*" dan "*Minawang*" mampu mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi di balik kondisi kelangkaan lahan di perdesaan. Kemampuan itu tergambar dari sikap kerelaan kedua golongan petani tersebut dalam mengatasi kelangkaan lahan. Bagi petani patron, nilai "*Situlung-tulung*" dan "*Minawang*" hadir ketika ia merelakan lahannya ke petani klien, agar dijadikan lahan garapan maupun untuk dijadikan sarana tempat tinggal. Sedangkan bagi petani klien, nilai "*Situlung-tulung*" dan "*Minawang*" hadir ketika ia dengan penuh kerelaan menyumbangkan tenaga dan jasanya untuk membalas kebaikan sang patron. Sumbangan itu baik dengan menggarap sawah maupun mengabdikan di rumah dan aktivitas lainnya seperti: berburu, menjaga ternak, mengambil kayu bakar, dan kurir (Matthes, 1865 dan Kooreman, 1883). Di samping itu, terwujudnya ikatan patron-klien di balik kelangkaan lahan adalah awal meluasnya konsep "Ajoareng-Joa" atau konsep yang menggambarkan identitas seorang patron sebagai majikan dan klien sebagai pekerja dalam struktur kelas di perdesaan. Penyatuan Ajoareng-Joa dalam sistem pertanian, juga merupakan awal dari terciptanya pemberian subsistensi dasar di berbagai pekerjaan persawahan, seperti: mempersiapkan lahan, menanam, menuai, dan mengirik padi. Penyatuan Ajoareng-Joa pada akhirnya mengaktualkan pola bertani sistem "*Tesang*". Sistem ini wajib membagi dua hasil persawahan antar Ajoareng dan Joa, berikut resiko gagal panen yang di hadapi. Di samping itu, sistem "*Tesang*" merupakan awal di perkenalkan sistem perburuhan dalam tradisi bertani bagi etnis Bugis, Makassar, dan Mandar. Dengan diperkenalkannya sistem "*Tesang*" dalam kagiatan pertanian, para Ajoareng dan Joa' memiliki wadah pertukaran sosial ekonomi menurut sistem barter dalam bentuk natura padi. Menurut Chabot (1950) bahwa dengan sistem "*Tesang*", para Ajoareng dan Joa saling terlindungi dalam kerangka "*Situlung-tulung*" dan "*Minawang*", kedua aspek ini sebagai simbol solidaritas sosial dan kohesivitas masyarakat tani di perdesaan. Dengan demikian, walaupun ketimpangan sumber daya menghiasi proses ikatan patronase, namun sikap saling melindungi dan tolong-menolong melandasi kondisi kehidupan keseharian antar patron dan klien. Ketika memasuki era kekuasaan penuh Pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1906, pola kepemilikan tanah sedikit mengalami perubahan, hal itu karena campur tangan pihak Kolonial yang melakukan pembukaan wilayah perkebunan rakyat di berbagai pelosok perdesaan, dan salah satu diantaranya didirikan di Kabupaten Polmas pada tahun 1910. Di wilayah ini mereka membuka puluhan hektar untuk usaha perkebunan seperti: kopi, cengkeh, coklat, dan industri kopra, yang dikelola oleh perusahaan Pemerintah Kolonial (VOC). Untuk kepentingan ini, mereka mendatangkan petani-petani pribumi asal Jawa yang menjadi kuli perkebunan di Deli Sumatera dan mahir soal pertanian kebun industri. Dan untuk sarana tempat tinggalnya mereka bangun wilayah pemukiman di Wonomulyo (sekarang Sidodadi). Realitas ini menjadikan sistem penguasaan tanah di Sidodadi berbeda dengan perdesaan lainnya di kawasan barat Sulawesi Selatan, dimana kepemilikan tanah terbebas dari kekuasaan Kerajaan, sehingga ketimpangan kepemilikan tanah oleh hadirnya migran Jawa praktis sedikit terhindari. Hal ini tidak terjadi di Amparita dan Bontorannu misalnya, dimana ketika itu ke-duanya terisolir oleh dunia luar dan terkoptasi oleh kekuasaan para bangsawan, sehingga ketimpangan kepemilikan lahan hadir bersamaan dengan ketimpangan kekuasaan dan status sosial, fenomena ini menjadikan ikatan patron-klien lebih bersifat asimetris; (b) Faktor Ketidakamanan Fisik dan Sosial Faktor ketidakamanan di era feodalisme ini berkaitan dengan tidak adanya pranata yang menjamin keamanan individu secara fisik dan sosial, sehingga para klien mencari perlindungan ke kaum bangsawan (patron) secara pribadi-pribadi. Menurut Scott (1972:102) bahwa meluasnya faktor ketidakamanan adalah karena lemahnya pranata sosial (utamanya hukum) yang menjamin rasa aman warga masyarakatnya, hal ini berakibat munculnya ikatan-ikatan pribadi yang menggeser pranata hukum tersebut. Faktor utama terjadinya ketidakamanan di era feodalisme, umumnya oleh faktor peperangan (antar kerajaan dengan kaum penjajah maupun antar kerajaan dengan kerajaan lainnya), dan konflik horizontal antar sesama

kaum bangsawan. Kalau menurut catatan Kooreman (1883), faktor yang dominan adalah peperangan. Menurutnya, peristiwa kedua peperangan tersebut umumnya melibatkan rakyat biasa secara besar-besaran, dan dalam peperangan tersebut kedua kelompok tidak hanya melakukan pembunuhan dalam memperebutkan kekuasaan di perdesaan, namun juga melakukan tindakan perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembakaran kampung. Perlakuan ini menjadikan sebagian besar warga masyarakat berlindung kepada patron yang netral atau yang tidak terlibat dalam peperangan tersebut. Sedangkan menurut catatan Bakkers (1862) bahwa yang lebih dominan adalah konflik horizontal antar sesama kaum bangsawan dalam memperebutkan kekuasaan di perdesaan, utamanya yang terjadi di dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Bugis dan Kerajaan Gowa. Dalam konflik horizontal tersebut terjadi friksi sesama kaum bangsawan, baik mengenai hal pribadi sehingga perlunya (ketersinggungan, iri hati, dan penegakan harga diri), maupun mengenai perebutan wilayah kekuasaan. Kedua pemicu konflik ini juga melibatkan pengikutnya secara besar-besaran dan melakukan tindakan pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan pembakaran kampung, secara silih berganti. Untuk tidak terlibat dalam konflik ini, menjadikan banyak petani berlindung kepada patron yang netral atau yang tidak terlibat dalam konflik horizontal tersebut. Kooreman maupun Bakkers sepakat bahwa mengaktualnya peperangan dan konflik horizontal, itu karena tidak adanya pranata sosial budaya yang mengatur keselamatan seseorang dari ketidakamanan fisik dan sosial, sehingga meluasnya unsur perlindungan melalui perseorangan dan mengaktualkan ikatan patron-klien. Menurut Kooreman dan Bakker, bahwa hal itu terjadi karena fungsi perlindungan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh pihak klien, namun juga dimanfaatkan oleh kalangan patron, baik demi berbagai kepentingan yang bersifat pribadi maupun demi mempertahankan status sosialnya. Bagi klien, dengan berlarut-larutnya ketidakamanan di perdesaan maka tidak ada jalan yang mesti ia tempuh selain berlindung kepada orang-orang kuat atau kalangan patron, agar terhindar dari pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembakaran kampung. Sedangkan bagi patron, ketidakamanan memiliki fungsi ganda dalam posisi kepatronannya, yakni di satu sisi dengan kondisi ketidakamanan maka dirinya makin di dekati oleh klien, sehingga status sosial dan kharismanya semakin tinggi, dan sisi lain dengan banyaknya klien maka dirinya makin terlindungi oleh serangan dari para musuh-musuhnya (kaum bangsawan lainnya). Fenomena ini menggambarkan bahwa ketidakamanan oleh peristiwa seperti: pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembakaran kampung, adalah kondisi yang mengisyaratkan tidak adanya pranata yang menjamin keamanan individu secara fisik dan sosial, sehingga meluas ikatan patron-klien di era feodalis. Fenomena ini sesuai dengan teori Scott (1972), yang menyebutkan bahwa: "Penyebab utama mengaktualnya ikatan patronase di balik kondisi yang menyebabkan ketidakamanan fisik dan sosial, adalah karena langkanya ataupun tidak bekerjanya pranata-paranata sosial yang sedianya menjamin keselamatan individu terhadap rasa aman akan status maupun sumber daya penting lainnya" (Scott, 1972:102). Oleh karenanya, semakin pranata-pranata sosial tersebut tidak bekerja secara maksimal maka semakin kuat ikatan-ikatan pribadi yang mengendalikan kekuatan hukum, keamanan, kekuasaan, dan sosial ekonomi, sehingga pola kekuasaan berada di tangan orang-orang kuat. Ketika memasuki era kemerdekaan (1945), kondisi ketidakamanan fisik dan sosial terus berlanjut, baik oleh peristiwa perang antar kaum pejuang dengan sisa-sisa tentara Kompeni, maupun perampokan dan pembakaran kampung yang dilakukan oleh kelompok pemberontak NKRI. Ketidakamanan oleh adanya peristiwa peperangan yakni terjadi ketika kedatangan kembali tentara KNIL yang dipimpin Westerling (tahun 1945-1949) yang melakukan sejumlah pembunuhan di berbagai daerah sebagai reaksi atas perlawanan kalangan pemuda, dan gerakan ini dikenal sebagai peristiwa korban 40.000 jiwa. Sedangkan peristiwa selanjutnya adalah gerakan pemberontakan yang menuntut terpisahnya Sulawesi Selatan dari wilayah NKRI. Hal ini oleh dua gerakan pemberontakan, yakni gerakan Permesta pimpinan V. Sumual di tahun 1957-1962, dan

gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar di tahun 1959-1965 yang membangun basis kekuasaan di pelosok perdesaan. Efek dari ke-dua peristiwa ini terhadap ikatan patron-klien menurut Pelras (1981:12-13) adalah bergesernya makna kepatronan seseorang di perdesaan, yakni dari kaum bangsawan ke kaum bersenjata atau pasukan gerombolan. Menurutnya, walaupun sebagian besar kaum bersenjata ini berasal dari kaum bangsawan namun posisi kepatronan-nya bergantung kepada sejauh mana keterlibatan mereka dalam pergerakan itu, karena semakin tinggi posisinya pada organisasi pergerakan (gerombolan) maka semakin banyak warga yang mau menjadi pengikutnya (klien). Pengikut yang setia pada organisasi tersebut juga di warisi beberapa orang klien yang secara sukarela mengikuti sang patron di hutan-hutan dan di daerah persembunyiannya. Berbagai fenomena yang menempatkan kondisi ketidakamanan sebagai salah faktor yang mewujudkan ikatan patron-klien di era feodalisme sejalan dengan temuan Boissevain (1966) dan Campbell (1964). Boissevain melihat bahwa, faktor perlindungan dari ketidakamanan fisik (pembunuhan, teror, dan intimidasi) yang merupakan sisa-sisa kebiasaan di era feodalis, sebagai penyebab tewujudnya ikatan patron-klien di Sicilia Italia. Sedangkan Campbell (1964) mengamati kehidupan para peternak dan kepala desa di Sarakatsan Yunani Selatan yang saling berlindung dalam kepentingan masing-masing; (c) Faktor Ketidakmampuan Unit Kekeabatan Menjadi Sarana Perlindungan Keamanan Dan Memajukan Diri Sebagai salah satu faktor yang mewujudkan hirarki ikatan patron-klien, menurut Scott (1972) bahwa faktor ketidakmampuan unit kekerabatan (*kinship bond* atau *kinship unit*) sebagai sarana mencari perlindungan keamanan dan sarana memajukan diri, adalah kondisi dimana kemampuan non-kerabat atau pihak luar lebih sanggup menjamin pemenuhan kebutuhan rasa aman dan sarana memajukan diri lainnya, ketimbang oleh kerabatnya sendiri. Di samping itu, hubungan dengan non-kerabat atau para kolega juga berfungsi sebagai “investasi sosial” terhadap upaya-upaya peningkatan sumber daya, perlindungan keamanan, dan aliansi personal. Di era feodalisme, ketidakmampuan unit kekerabatan menjadi sarana perlindungan keamanan dan memajukan diri, berlangsung dalam unit kerabat bangsawan (patron) dan terlebih lagi dalam unit kerabat kaum budak (klien). Dalam unit kerabat kaum bangsawan, ketidakmampuan unit kerabat menjadi sarana perlindungan dan memajukan diri, berlangsung ketika peperangan antar bangsawan tidak kunjung berhenti, serta ketika mereka mengadakan perdagangan secara regional (perdagangan antar pulau) dan secara internasional (perdagangan dengan negara lain). Ketika peperangan berlangsung, beberapa orang bangsawan (patron) Bugis-Makassar menjalin kerja sama dengan daerah-daerah lain seperti Kerajaan: Bima, Kutai, Toli-Toli, Ternate, Muna, Flores, dan Ende, baik untuk kepentingan tukar menukar pengikut (pasukan) maupun oleh kepentingan perlindungan keamanan dalam pelarian bagi kedua belah pihak. Menurut Kooreman (1883) bahwa gagasan kerja sama itu tercipta karena peperangan yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah peperangan antar sesama kerabat dan bahkan antar sesama saudara bangsawan sendiri. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa ikatan patron-klien meluas ketika unit kekerabatan yang justeru sebagai sumber ketidakamanan dan kerabat terdekat yang menjadi lawan dalam peperangan tersebut, sehingga ikatan patron-klien secara vertikal terbentuk ketika masing-masing pihak berperan sebagai pelindung dan yang dilindungi. Sedangkan disaat kalangan bangsawan (patron) mengadakan hubungan dagang dengan pihak luar (baik secara regional maupun secara internasional), ketidak-mampuan unit kerabat menjadi sarana memajukan diri, nampak ketika kondisi perdagangan di tingkat lokal hanya mengenal sistem barter (Friedericy, 1933). Dengan sistem barter, barang-barang yang diperdagangkan hanya sebatas pada kebutuhan pokok saja, dan cenderung siklus perdagangan hanya sebatas kerabat maupun orang-orang terdekat sang pedagang, hal itu terjadi karena hanya mereka yang menguasai lahan dan modal. Namun ketika kaum pedagang luar (Portugis, Inggris, China, Belanda, dan Arab) berada di Sulawesi Selatan (di pertengahan abad XVII dan di akhir XIX) yang membawa sistem perdagangan kapital dan pasar, sistem perdagangan model barter secara perlahan-lahan mereka tinggalkan.

Dengan sistem perdagangan model kekuatan kapital dan pasar, kaum bangsawan melakukan perdagangan di tingkat regional di abad XIX. Dengan ditinggalkannya sistem barter maka hubungan perdagangan model kekerabatan akhirnya mereka juga tinggalkan, ini artinya ketidakmampuan unit kerabat menjadi sarana memajukan diri, terpresentasikan. Adapun arus hubungan patron-klien di balik hubungan perdagangan tersebut adalah kaum bangsawan menjadi klien ketika berhadapan dengan pedagang luar negeri, dan menjadi patron ketika berhadapan dengan pedagang di tingkat regional.

Di Era Modernisasi (1970 hingga Kini)

Fase revolusi hijau di Sulawesi Selatan dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dengan mengangkat tema lokal yakni "*Program Lappo Ase*" atau program ledakan produksi padi menuju swasembada beras di tingkat nasional. Selama 15 tahun berlangsungnya revolusi hijau, proses terbentuknya ikatan patronase telah banyak yang bergeser dari basis askripsi, walaupun demikian basis prestasi belum tampil secara utuh. Untuk mengetahui perubahan itu di tiga wilayah penelitian, uraian kembali mengacu rumusan tiga wujud hirarki ikatan patron-klien. Realitas dari ke-tiga wujud ini ditelusuri melalui perpaduan antar wawancara dan hasil kajian mengenai perkembangan ikatan patron-klien di revolusi hijau : (a) *Ketimpangan Kepemilikan Sumber Daya (Kekayaan, Status Sosial, dan Kekuasaan)* Sebagai faktor yang sangat berperan mewujudkan hirarki ikatan patron-klien di era revolusi hijau, ketimpangan kepemilikan sumber daya terdiri atas tiga unsur yang saling mempengaruhi, yakni ketimpangan: kekayaan, status sosial, dan kekuasaan, untuk menjelaskan ke-tiga unsur ini maka penjelasan dimulai dengan ketimpangan kepemilikan harta kekayaan. Hal yang dominan mewujudkan ikatan patron-klien dari unsur ketimpangan kekayaan adalah ketimpangan kepemilikan lahan (utamanya persawahan) antar petani kaya dan petani miskin (Minullah, 1992; Daming, 1984; dan Effendi, 1981). Salah satu faktor yang memuluskan terciptanya ikatan patron-klien oleh faktor ketimpangan kepemilikan lahan adalah ketika mobilitas kepemilikannya tidak diciptakan oleh petani kaya, di sisi lain diperlambat oleh lembaga pemerintah, serta oleh nilai-nilai tradisi masyarakatnya. Akumulasi dari masalah mobilitas ini menurut Scott (1972) adalah terjadinya kelangkaan lahan dan meluasnya kemiskinan di perdesaan. Terwujudnya ikatan patron-klien oleh faktor kelangkaan lahan menurut Scott (1972) dapat di lihat dalam empat aspek yang saling terkait, yakni: hilangnya sumber daya lepas, kebijakan pemerintah, involusi pertanian (mengutip teori Geertz, 1963), pasarisasi lahan, dan aspek ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan luas lahan (kepadatan penduduk). Dihubungkan dengan temuan Minullah, 1992; Daming, 1984; Effendi, 1981; dan informan, nampaknya hanya aspek kepadatan penduduk yang tidak relevan dengan teori Scott tersebut, sedangkan yang ketiganya relevan. Untuk menjelaskan ke-empat aspek ini, uraian dimulai dari hilangnya sumber daya lepas. Hilangnya sumber daya lepas berkaitan dengan hilangnya kebebasan petani miskin (terutama petani tuna lahan) yang selama bertahun-tahun memanfaatkan tanah-tanah terlantar milik petani kaya, pemerintah, maupun tanah milik komunal, untuk bercocok tanam dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Di samping itu, dengan hilangnya sumber daya lepas tersebut maka untuk menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari, ia dan keluarganya secara kerelaan menggantungkan hidupnya secara patronase pada petani kaya, baik untuk kebutuhan makannya maupun demi memperoleh utang dan perlindungan tertentu lainnya. Sedangkan faktor yang menyebabkan hilangnya sumber daya lepas tersebut menurut Minullah (1992); Daming (1984); dan Effendi (1981) adalah karena para pemiliknya telah memagari, memproteksi, dan mengambil alih tanah-tanah tersebut menjadi persawahan komersial yang sesuai tuntutan revolusi hijau. Selain faktor hilangnya sumber daya lepas, fenomena kelangkaan tanah di perdesaan juga dilatar belakangi oleh faktor lemahnya *political commitment* pemerintah dan faktor involusi pertanian. Kelemahan *political commitment* pemerintah terkait dengan kebijakan *Landreform* berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) tahun 1960, dianggap mengabaikan masalah mendasar dalam pembangunan pertanian, yakni mengatasi kelangkaan tanah di

perdesaan ketika revolusi hijau dicanangkan (Soetrisno, 1985:26-27). Fenomena sosial di balik pengabaian ini adalah kembalinya mantan para bangsawan mendominasi pola kepemilikan tanah dan menjadi patron di perdesaan, sedangkan masyarakat biasa lainnya (non-bangsawan) tetap merasakan kelangkaan lahan. Menurut informan di tiga wilayah penelitian, terabainya penjabaran UUPA karena *Landreform* lebih mengarah ke kepentingan politik ketimbang merealisasi setiap pasal di dalamnya. Arah kepentingan politik itu adalah, *landreform* lebih ke bentuk agitasi politik untuk memobilisasi petani ke partai politik penguasa. Arah ini nampak dari realisasi *landreform*, dimana berbagai tanah milik kerajaan yang dikonversi ke berbagai bentuk, ternyata lebih ke pembangunan sarana umum, ketimbang diberikan ke penduduk yang tidak berlahan. Dengan pendirian sarana umum tersebut maka hak politik petani dipaksa untuk mengikuti partai politik penguasa, dimana mayoritas mantan bangsawan (sebagai penguasa tanah dan elitis di perdesaan) yang menjadi pelopor dan pelindung di partai tersebut. Sedangkan faktor involusi pertanian sebagai faktor langkanya kepemilikan tanah di perdesaan dapat diamati dari efek tradisi perkawinan antar kerabat orang Bugis-Makassar yang bentuknya eksogami. Menurut Errington (1977) dan Millar (1981) bahwa bentuk eksogami itu di samping membatasi perkawinan dengan orang luar kerabatnya, juga membatasi harta benda (utamanya tanah) seseorang (suami maupun isteri) beralih ke pihak lain. Terbatasnya peralihan tanah tersebut menyebabkan bentuk perkawinan yang ideal adalah model "*Assialang Marola*" (perkawinan antar sepupu sekali) atau paling tidak model "*Assialang Memeng*" (perkawinan sepupu dua kali). Fenomena sosial di balik ke-dua model ini menurut Millar (1981) bahwa, kekuasaan tanah bagi strata atas cenderung semakin bertambah, sebaliknya bagi strata bawah semakin terbatas peluangnya memperoleh tanah. Berkaitan hal ini, faktor ketimpangan sumber daya lainnya yang berperan mewujudkan ikatan patron-klien di era revolusi hijau adalah ketimpangan dalam status sosial dan ketimpangan kekuasaan. Ke-dua bentuk ketimpangan ini bermula ketika sebagian besar kegiatan revolusi hijau menjadi bagian tugas dari para birokrat dan pihak keamanan, sehingga makin meluas kekuasaan pemerintah pusat di perdesaan. Perluasan ini adalah gambaran terjadinya pergeseran dasar terhadap penilaian status sosial dan kekuasaan, yakni dari kriteria askripsi ke kriteria prestasi. Pada penilaian status sosial ditandai oleh eksisnya unsur pendidikan dan pekerjaan yang mengimbangi unsur pewarisan, sedangkan pada penilaian kekuasaan ditandai oleh eksisnya pendidikan memberi akses prestasi ekonomi dan karir seseorang, yang menggeser peran kekuasaan kepemimpinan tradisional. Penjelasan tentang ketimpangan status sosial sebagai faktor yang mewujudkan ikatan patron-klien di era revolusi hijau, berkaitan erat dengan munculnya peran-peran baru dalam masyarakat yang berdasarkan pendidikan dan pekerjaan seseorang. Mengaktualnya unsur pendidikan dan pekerjaan formal sebagai acuan status sosial di era revolusi hijau nampaknya berjalan kurang dinamis, hal itu disebabkan masih masih mendominasinya eks kaum bangsawan di ke-dua aspek tersebut, sehingga proses mobilitas status masih berada pada kelompok ini (Pelras, 1981; Lineton, 1975; dan Walinono, 1979). Dominasi ini dianggap wajar karena golongan inilah yang mampu mengenyam pendidikan dan bekerja di pemerintahan ketika wilayah perdesaan dilanda berbagai konflik dan kesulitan ekonomi. Dominasi ini juga menurut Lineton (1975) menjadikan struktur sosial di perdesaan ketika revolusi hijau terbagi atas dua kelompok, yakni kelompok elitis yang terdiri dari birokrat, militer, dan mantan bangsawan, serta kelompok non-elitis yang terdiri dari petani miskin, petani tuna lahan, dan para pedagang. Munculnya dua kelompok masyarakat ini menurut Pelras (1981:21), kondisinya menurun ke struktur ikatan patron-klien di kegiatan pertanian, dimana dengan harta dan kewenangan yang dimiliki, para elitis dan kelompoknya kembali menjadi pelindung dari beberapa orang klien plus keluarganya. Dinamika ini menjadikan kelompok elitis tidak saja muncul sebagai penguasa baru, melainkan pula sebagai strata atas yang sekaligus orang kaya baru di perdesaan. Di sisi lain menurut informan, dengan wewenang dan harta benda miliknya menjadikan magnet bagi para petani dan kelompok masyarakat lainnya untuk berlindung padanya, baik untuk

urusan usaha tani, kebutuhan subsistensi, maupun untuk pemenuhan kebutuhan minimum lainnya. Fenomena perlindungan ini menjadikan intensitas ikatan patronase tidak hanya berlangsung pada tingkat atas saja namun juga meluas pada tingkat masyarakat bawah, baik itu diperluas oleh famili maupun oleh kroni para elitis. Sedangkan ketimpangan sumber daya lainnya yang menjadi pemicu terwujudnya ikatan patron-klien di era revolusi hijau adalah ketimpangan dalam kekuasaan. Apabila di era feodalisme yang menjadi penyebabnya ketimpangan kekuasaan adalah peran kepemimpinan yang sifatnya askriptif, maka di era revolusi hijau yang menjadi penyebabnya adalah penguasaan teknologi dan kapital. Ke-dua unsur kekuasaan ini menjadi alat ketergantungan petani miskin ke petani kaya ketika pemerintah mengoptimalisasikan kegiatan usaha tani. Terwujudnya ikatan patron-klien yakni ketika petani kaya memonopolisasi kepemilikan teknologi, berikut lebih berpeluang memperoleh surplus kapital dari usaha taninya. Penggunaan teknologi itu sendiri dimulai pada tahun 1976, yakni ketika pemerintah mengharuskan petani mengubah pola tanam sekali setahun ke pola dua kali setahun sebagai realisasi dari berbagai pembangunan sarana dan prasarana pertanian moderen, berikut melakukan upaya dengan “*Uniformitas*” atau upaya pertanian kolektif terhadap penggunaan media pertanian moderen, seperti: bibit, pupuk, pembajakan, dan tata guna air.

Faktor Ketidakamanan Fisik dan Sosial

Sebagai salah satu faktor yang berperan mewujudkan hirarki ikatan patron-klien di perdesaan Sulawesi Selatan, ketidakamanan fisik dan sosial di era revolusi hijau tidak lagi bermotif perseteruan kekuatan antar sesama elitis dalam perebutan kekuasaan, melainkan oleh motif penyebar luasan modernisasi pertanian yang menciptakan konflik vertikal antara kubu pemerintah versus kubu kontra pemerintah di perdesaan (Mudyono, 1978; Effendi, 1981; dan Pelras, 1981). Dalam konflik vertikal itu, menurut informan, bahwa di tahun 1972-1980-an muncul dua kubu yang saling berseteru oleh penyebar luasan tersebut, yakni kubu yang pro dengan pemerintah (umumnya dari kalangan birokrat, elitis, dan petani kaya) dan kubu yang kontra dengan pemerintah (segelintir mantan pemberontak dan *penganut kepercayaan tradisional*). Dalam perseteruannya masing-masing membawahi sekelompok orang banyak. Konflik vertikal bermula ketika kubu pro (plus pemerintah) berkepentingan menyebar luaskan pertanian moderen, namun tanpa sosialisasi yang baik dan tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tindakan ini ternyata tidak direspon baik oleh seluruh warga masyarakat, bahkan baik langsung maupun tidak langsung beberapa pihak bersatu untuk menyatakan penolakan dan protes terhadap kehadiran modernisasi pertanian di wilayahnya. Akumulasi dari pertentangan ini akhirnya melahirkan berbagai aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat petani, aksi itu seperti: pemukulan, intimidasi, sabotase, pemboikotan, pencurian, dan pengrusakan fasilitas pertanian moderen milik pemerintah. Dari berbagai aksi kekerasan tersebut akhirnya mengaktualkan ketidakamanan fisik dan sosial di perdesaan. Dimana ketidakamanan fisik mengaktual lewat aksi pemukulan dan intimidasi yang dilakukan oleh ke-dua kelompok bertikai terhadap warga masyarakat maupun terhadap anggotanya di masing-masing kubu. Demikian halnya kondisi ketidakamanan sosial, teraktual melalui aksi-aksi seperti: sabotase, pemboikotan, pencurian, dan pengrusakan, utamanya yang dilakukan oleh kubu kontra terhadap warga di ke-dua kubu dan terhadap sarana prasarana pertanian moderen milik pemerintah. Terwujudnya ikatan patron-klien di balik berbagai tindakan aksi kekerasan dalam ketidakamanan fisik dan sosial ini, yakni ketika para petani memerlukan jaminan perlindungan rasa aman terhadap aktivitas usaha tani dan kehidupan sehari-harinya. Dalam keperluan jaminan perlindungan tersebut, para petani yang terancam ketidakamanannya cenderung lebih memilih berlindung secara pribadi kepada orang-orang kuat di perdesaan alias para patron lokal, ketimbang ke salah satu kubu yang berseteru. Pilihan ini diambil dengan pertimbangan bahwa berlindung ke patron tersebut tidak hanya akan terjamin rasa amannya saja namun juga sekaligus terjamin pemenuhan kebutuhan subsistensi dasarnya sehari-sehari, baik pada dirinya sendiri maupun anggota keluarganya.

Di sisi lain, eksistensi jaminan perlindungan tersebut ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh petani miskin namun juga oleh petani kaya, sehingga arus hubungan patronase dengan petani miskin juga terlaksana. Arus hubungan itu tercipta sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai aksi sabotase dan pengrusakan usaha taninya, serta demi terhindar oleh ancaman atas keselamatan ia dan anggota keluarganya. Hal itu menyebabkan mereka merekrut lebih banyak tenaga klien, baik petani yang berasal dari kampungnya sendiri maupun petani yang berasal dari luar kampungnya. Namun menurut informan, beberapa patron justru memanfaatkan kondisi ketidakamanan fisik dan sosial untuk pengembangan usaha taninya, hal ini karena di satu sisi mereka tetap berhubungan harmonis dengan pihak pemerintah, dan di sisi lain juga akrab dengan pihak yang kontra karena sebagian besar dari mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sifat akal-akalan ini diduga sebagai upaya *pressure* kepada kliennya agar tetap berlandung secara patuh dan tidak beralih ke patron lain. Ke-dua aspek ini berlangsung mengingat kondisi sosial ekonomi di perdesaan semakin cerah, hal itu seperti: pola panen telah berubah menjadi 2 kali dalam setahun, semakin maraknya proyek-proyek pemerintah, dan peluang bisnis di berbagai sektor usaha tani semakin bergairah di perdesaan, hal ini artinya harapan untuk menuai surplus usaha tani di tengah-tengah kondisi ketidakamanan fisik dan sosial, semakin menjanjikan.

Faktor Ketidakmampuan Unit Kekeabatan yang Menjadi Sarana Perlindungan Keamanan dan Sarana Memajukan Diri

Menurut Scott (1972:101-103) bahwa terdapat dua aspek yang menjadi penyebab mengaktualnya hirarki ikatan patron-klien oleh faktor ketidakmampuan unit kerabat menjadi sarana perlindungan keamanan dan sarana memajukan diri ketika modernisasi meluas di wilayah perdesaan, yakni aspek komersialisasi dan aspek pertumbuhan pasar. Ke-dua aspek ini menurutnya, di satu sisi berfungsi untuk melemahkan posisi kekeabatan sebagai pemberi kedua sarana itu, dan di sisi yang lain berfungsi untuk melapangkan jalan para patron dan klien untuk mencapai kedua sarana tersebut. Dari studi yang ada memperlihatkan bahwa ketika satu dasawarsa (1970-1980) revolusi hijau digelar, ternyata fenomena ke-dua aspek ini juga berlangsung di perdesaan Sulawesi Selatan, dimana ke-dua aspek tersebut meluas setelah modernisasi melalui komersialisasi dan pertumbuhan pasar berhasil menggeser peranan keluarga sebagai penjamin kedua sarana tersebut. Salah satu indikasi dari pergeseran tersebut adalah adanya kecenderungan dari para petani untuk memilih pihak non-kerabat (tetangga, kenalan orang tua, mantan teman sekolah, dan kerabat tetangga kampung) ketimbang kerabatnya sendiri (famili terdekat maupun jauh yang masih memiliki hubungan sedarah), dalam pencapaian kebutuhan akan sarana keamanan dan sarana memajukan diri (Daming, 1984; Effendi, 1981; Minullah, 1992; dan oleh informan, 2004). Pada aspek komersialisasi, kecenderungan para petani memilih non-kerabat ketimbang kerabatnya sendiri dalam menjalankan pertanian komersial (usaha tani, buruh tani, dan usaha jasa pertanian lainnya) berawal ketika pemerintah daerah menerapkan sistem dua kali panen dalam setahun (Effendi, 1981 dan Minullah, 1992). Ketika itu menurut Minullah (1992:55-62) berbagai kepentingan dalam pola dua kali penen tidak lagi ditangani sepenuhnya oleh petani, melainkan terlibatnya pula berbagai pihak non-tani (seperti: pedagang, birokrat, aparat, teknokrat, dan lembaga-lembaga BUMN) yang berkepentingan mengatur tata produksi usaha tani, mencari keuntungan, maupun dalam membangun infra struktur pertanian moderen di perdesaan. Dalam berbagai aktivitasnya, ternyata hubungan petani dengan pihak non-kerabat lebih intens dilakukan ketimbang dengan pihak kerabatnya sendiri. Menurut informan dan Minullah (1992) bahwa, intensitas itu lebih disebabkan oleh bergesernya orientasi petani dalam menjalankan pola pertanian komersial, yakni dari orientasi yang dahulunya berdasarkan nilai adat dan kekuasaan, beralih ke orientasi perhitungan untung rugi (*remuneratif*). Pergeseran orientasi inilah yang diduga sebagai awal kian melemahnya ikatan kekeabatan memberi akses kedua sarana tersebut, di sisi lain adalah semakin berperannya pihak non-kerabat sebagai pihak yang lebih mampu memberi akses terhadap pencapaian sarana perlindungan keamanan dan

sarana memajukan diri, sehingga meluas ikatan patron-klien antar petani miskin dan petani kaya (masing-masing berstatus non-kerabat), ketika petani berada pada pertanian komersial. Sebagai faktor yang mengaktualkan ikatan patron-klien dengan pihak non-kerabat, orientasi untung rugi yang mendasari pemikiran petani kaya dan petani miskin terbedakan oleh ekspektasi yang ada. Bagi petani kaya, dengan berbagai kelebihan sumber dayanya (utamanya kekayaan), untuk memanifestasikan kedua sarana tersebut, mereka cenderung berhubungan dengan petani miskin non-kerabat, ketimbang dengan anggota kerabatnya sendiri. Pertimbangan ini diambil karena orientasi untung rugi (*remuneratif*) yang mendasari ekspektasinya adalah agar: lebih leluasa memberi sanksi apabila tidak patuh, lebih leluasa berkompromi soal upah dan soal pemberhentian hubungan kerja tanpa melibatkan pertimbangan kekeluargaan, serta lebih irit pemakaian anggaran dalam kegiatan produksi karena tidak perlu lagi menyediakan biaya makan dan rokok. Ekspektasi petani kaya ini mengisyaratkan tercapainya wahana keamanan dan sarana memajukan diri melalui hubungan kerjanya dengan petani miskin non-kerabat. Sebaliknya bagi petani miskin, ekspektasinya menjalin ikatan patron-klien dengan petani kaya non-kerabat adalah, di samping karena nasib sebagian besar kerabatnya bernasib miskin, juga karena ia lebih leluasa memobilisir pola untung rugi (*remuneratif*) tersebut kepada petani kaya non-kerabat dalam usaha tani, hal itu seperti: lebih mudah memutuskan hubungan kerja apabila tidak berkeinginan lagi, lebih leluasa meminta bantuan pada kepentingan pribadi (biaya perkawinan, biaya berobat, dan biaya perbaikan rumah), serta ada wadah untuk mengutang apabila berada dalam kondisi kesulitan hidupnya. Ekspektasi petani miskin ini mengisyaratkan tercapainya wahana keamanan dan memajukan diri melalui hubungan kerjanya dengan petani kaya non-kerabat. Apabila fenomena ini di hubungkan dengan teori Etzioni (1961), maka berbagai aspek yang berkaitan peralihan orientasi ini adalah gambaran bahwa intensitas modernisasi telah menstimulir kondisi tingkat kepatuhan (*compliance*) seseorang dalam organisasi sosialnya, dimana kepuasan yang membuat seseorang patuh karena paksaan (*coercive*) bergerak terus menuju kepatuhan yang berdasarkan norma moral (*normatif*) dan sampai ke tingkat kepatuhan yang berdasarkan aspek untung rugi (*utilitarian*). Sedangkan terciptanya kepatuhan berdasarkan untung rugi (*utilitarian compliance*) menurut Etzioni (1961:12-14) adalah apabila pola kerja industrial dan ekonomis telah menjadi pilihan orang-orang yang terlibat dalam organisasi sosial tersebut. Mengaktualnya orientasi untung rugi dalam ikatan patronase juga ditemukan Lande (1973) di Philipina, temuannya menyebut bahwa ketika para petani terlibat penuh dalam pertanian komersial, orientasi untung rugi tidak dapat dihindari baik patron maupun klien.

Kesimpulan Pergeseran memperlihatkan bahwa melemahnya ikatan patronase antar patron dan klien di Sidrap dan Jenepono, karena arah hirarki vertikal yang mengikat patron dan klien di kegiatan usaha tani masih berpola konvensional (umumnya penguasaan sarana ekonomi masih dipegang kerabat patron dan masih eksisnya pola feodalis), kondisi ini hanya mengarahkan hirarki lebih berorientasi ke tindakan eksploitasi (timpangnya pembagian hasil kerja dan klien hanya dijadikan alat kekuasaannya) ketimbang intens dalam memberi perlindungan.

Referensi

- Ahimsah Putra, Hs. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien Di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Akkas, Rusli. 1995. *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Watu, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*. Makassar: Unhas Pers.
- Alexander, J.C. 1992. *Durkheim's Problem and Differentiation Theory Today*. Dalam H. Haferkamp and N.J. Smelser (Eds). *Social Change and Modernity*. California: California University Press.
- Amaluddin, M. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus Desa Bulugede, Kendal, Jateng*. Jakarta: UIP.

- Blau M. Peter. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. U.S.A. and London: Transaction Publishers.
- Blumer, Herbert. 1972. *Symbolic Interactions*. San Fransisco: Chandler Publ. Company.
- Boissevain, Jeremi. 1966. *Patronage in Sicily*. Man: Vol.1 (I).
-----, 1969. *Patrons and Brokers*. London: The Athlone Press.
- Campbell, John. 1968. *Two Case Studies of Marketing and Patronage in Greece*. The Hague: Mouton and co
- Chabot, H.T. 1950. *Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes*. Jakarta: Groningen.
- Effendi, Rusman. 1981. *Punggawa dan Pajjama*. Makassar: PLPIIS-Unhas.
- Friedericy, H.J. 1933. *De Standen bij De Boegineezen en Makassaren*. Holland: Gravenhage
- Haerani, Any. 1996. *Ikatan Patron-Klien, Kemiskinan, dan Pengwilayahan Komuditas Unggulan Di Jeneponto*. Makassar: Unhas.
- Haferkamp, H, dan N.J. Smelser. 1992. *Social Change and Modernity (halaman 97-119)* Berkeley: University of California.
- Kooreman, J.P. 1883. *De Feitelijke Toestand in het Gouver-nementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden*. Holland.
- Legg, R. Keith. 1983. *Patrons, Client, and Politikans*. Berkeley: University of California Perss.
- Lemarchand, Rene. 1972. *Politikal Clientelism and Ethnycity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation-Building*: American Political Science Review, Vol. 65,
- Matthes, B.F. 1885. *Over de Ada's of gewoonten der Makassaren en Boegineezen*. Holland.
- Mattulada. 1995. *Latoa: Satu Lukisan Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Disertasi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Minullah. 1992. *Siapa yang Menikmati Revolusi Hijau di Sidrap*. Makassar: PPS Unhas.
- Paine, Robert. 1971. *A Theory of Patronage and Brokerage*. New York: Memorial University of Newfounland.
- Parakkasi, Asmar, A. 1992. *Eksistensi Ikatan Patron-Klien Di Tengah Kemajuan Pertanian Agrobisnis Di Wonomulyo*. Ujung Pandang: PPS. Unhas.
- Pelras, Christian, 1981. *Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis-Makassar*. Makassar: Monografi.
- Sallatang, Arifin. 1982. *Pinggawa-Sawi: Suatu studi Sosiologi Kelompok Kecil*. Jakarta: Depdikbud.
-----, 1997. *Pengwilayahan Komuditas Sebagai Konsep Pembangunan Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Unhas
- Scott, James.C. 1972a. *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. *The American Political Science Review* 66 (1).
-----, 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Silverman, Sydel. 1965. *Patronage and Community-Nation Relationship in Central Italy*. Roma: Etnology Press.
- Syamsuddin, Haris. 1990. *Eksistensi Ikatan Patron-Klien Di Tengah Meluasnya Pertanian Komersial Di Maros*. Ujung Pandang: LPPM Unhas.

7._FASE_IKATAN_PATRONASE_DARI_ERA_FEODALIS_DAN_MO...

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ id.123dok.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude assignment On
template

Exclude matches < 1%